



PENETAPAN

Nomor 100/Pdt.P/2016/PA Tkl.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah (itsbat nikah) yang diajukan oleh :

Sainella Dg. Maro bin Nguru, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Lingkungan Bilacaddi, Kelurahan Maradekaya, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, sebagai pemohon I.

Kartini Dg. Jinne binti Dg. Lalla, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Lingkungan Bilacaddi, Kelurahan Maradekaya, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar sebagai pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon I dan pemohon II.

Telah memeriksa bukti-bukti pemohon I dan pemohon II.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 14 Oktober 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dalam register Perkara Nomor 100/Pdt.P/2016/PA Tkl., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada 5 Juni 1979, pemohon I dengan pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Lingkungan Bilacaddi, Kelurahan Maradekaya, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah saudara kandung pemohon II yang bernama Saparuddin Dg. sore.
3. Bahwa pemohon I dan pemohon II dinikahkan oleh Imam Lingkungan Maradekaya, Kabupaten Takalar bernama Zakaria Dg. Rani dan yang

Hal. 1 dari 8 hal. Pen. No. 100/Pdt.P/2016/PA Tkl.



menjadi saksi nikahnya adalah dua orang laki-laki dewasa beragama Islam, masing-masing bernama Manny Dg. Tika dan Padaruddin Dg. Ngopa, dengan mas kawin (mahar) berupa sawah satu petak seluas 0,7 are, dibayar tunai.

4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan.

5. Bahwa antara pemohon I dan pemohon II sepupu dua kali dan tidak sesusuan serta tidak ada larangan/halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Bahwa setelah pernikahan tersebut, pemohon I dan pemohon II bertempat tinggal di rumah orangtua pemohon II di Lingkungan Bilacaddi, Kelurahan Maradekaya, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar sampai sekarang; dan telah hidup rukun sebagai suami istri dan dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama :

6.1. Idayanti, S. Pd binti Sainella Dg. Maro,

6.2. Sulfan bin Sainella Dg. Maro,

6.3. Ismail bin Sainella Dg. Maro,

6.4. Musdalifah binti Sainella Dg. Maro;

7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat atau berkeberatan atas pernikahan pemohon I dengan pemohon II tersebut dan selama itu pula pemohon I dengan pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam.

8. Bahwa pemohon I dengan pemohon II tidak pernah mendapatkan Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar dan setelah pemohon I dengan pemohon II mengurusnya, ternyata pernikahan pemohon I dengan pemohon II tersebut tidak tercatat pada instansi yang berwenang dalam pencatatan perkawinan.

9. Bahwa pemohon I dan pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Takalar, guna dijadikan sebagai alas hukum mengurus buku nikah dan hak-hak keperdataan lainnya.

Hal. 2 dari 8 hal. Pen. No.100/Pdt.P/2016/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa para Pemohon pemohon I dan pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka pemohon I dan pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq. Hakim tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (Sainella Dg. Maro bin Nguru) dengan pemohon II (Kartini Dg. Jinne binti Dg. Lalla) yang dilangsungkan pada 5 Juni 1979 di Lingkungan Bilacaddi, Kelurahan Maradekaya, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, pemohon I dan pemohon II telah hadir sendiri, dan hakim tunggal telah memberikan nasehat terkait permohonannya tersebut berdasarkan hukum Islam, akan tetapi pemohon I dan pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa selanjutnya hakim tunggal membacakan surat permohonan pemohon I dan pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon I dan pemohon II

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, pemohon I dan pemohon II telah mengajukan alat bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sainella Dg. Maro Nomor 7305071405590003 tanggal 24 Maret 2013, telah bermeterai cukup dan distempel pos, oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi kode P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kartini Dg. Jinne Nomor 7305077112560012 tanggal 24 Maret 2013, telah bermeterai cukup dan distempel pos, oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi kode P.2.

Hal. 3 dari 8 hal. Pen. No.100/Pdt.P/2016/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Sainella Dg. Maro Nomor 7305072501055651 tanggal 24 Mei 2010, telah bermeterai cukup dan distempel pos, oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi kode P.3.

Bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon I dan pemohon II mengajukan dua orang saksi yaitu : Mannya Dg. Tika bin Ta'le dan Saparuddin Dg. Sore bin Baco, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagaimana telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang perkara ini.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut pemohon I dan pemohon II menerimanya dan membenarkannya.

Bahwa selanjutnya pemohon I dan pemohon II menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan.

Bahwa untuk ringkasnya uraian isi penetapan ini, maka segala hal yang terjadi di persidangan tentang yang tercatat di dalam berita acara sidang ini dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon I dan pemohon II sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 huruf (d). Perkara ini dapat disidangkan dengan hakim tunggal.

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 jo Surat Edaran mahkamah agung Nomor 4 Tahun 2015 huruf (e), pemanggilan pemohon yang lebih dari satu dapat dilakukan dengan diumumkan melalui papan pengumuman atau media lain yang dimiliki pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut panggilan pemohon dalam perkara ini telah dilakukan melalui papan pengumuman pada Kantor Pengadilan Agama Takalar dan Kantor Bupati Takalar.

Menimbang, bahwa permohonan Istbat Nikah telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, hakim tunggal berpendapat bahwa secara formal permohonan pemohon I dan pemohon II dapat diterima dan dipertimbangkan.

Hal. 4 dari 8 hal. Pen. No.100/Pdt.P/2016/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah karena pemohon I dan pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, disebabkan tidak terdaftar di kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat pernikahan pemohon I dan pemohon II.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon I dan pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P1, P2, dan P3.

Menimbang, bahwa bukti P1 sampai dengan P3 tersebut setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh/dihadapan pejabat yang berwenang dan diberi meterai secukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai, bercap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, isinya relevan dengan perkara yang diajukan oleh para pemohon, bukti tersebut dinilai sebagai bukti akta otentik yang kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg., sehingga bukti tersebut secara formal dan materiil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti yang sah dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut, maka ternyata pemohon I dan pemohon II adalah penduduk yang bertempat tinggal dalam wilayah hukum Kabupaten Takalar, Propinsi Sulawesi Selatan, sehingga Pengadilan Agama Takalar berwenang secara relative untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 ternyata bahwa pemohon I adalah kepala keluarga (sebagai suami), sedangkan pemohon II adalah sebagai istri.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut pemohon I dan pemohon II telah mengajukan dua orang saksi masing-masing telah berusia dewasa, memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah, serta tidak satu alasan pun yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg., sehingga kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai saksi di persidangan.

Hal. 5 dari 8 hal. Pen. No.100/Pdt.P/2016/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai materi keterangan saksi-saksi tersebut keduanya mendukung dalil-dalil permohonan pemohon I dan pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon I dan pemohon II yang dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan pemohon I dan pemohon II tersebut, hakim tunggal dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa pada 5 Juni 1979 pemohon I telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan pemohon II di Lingkungan Bilacaddi, Kelurahan Maradekaya, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar.
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan pemohon I dan pemohon II adalah saudara kandung pemohon II yang bernama Saparuddin Dg. sore dan dinikahkan oleh Imam Lingkungan Maradekaya, Kabupaten Takalar yang bernama Zakaria Dg. Rani, yang dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Mannya Dg. Tika dan Padaruddin Dg. Ngopa, dengan mas kawin berupa sawah satu petak seluas 0,7 are, dibayar tunai.
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan.
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon I dan pemohon II hidup rukun sebagai suami istri dan tinggal di rumah orangtua pemohon II di Lingkungan Bilacaddi, Kelurahan Maradekaya, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar sampai sekarang; dan tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama : 1. Idayanti, S. Pd binti Sainella Dg. Maro, 2. Sulfan bin Sainella Dg. Maro, 3. Ismail bin Sainella Dg. Maro, dan 4. Musdalifah binti Sainella Dg. Maro.
5. Bahwa pemohon I dan pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari pengadilan Agama Takalar, untuk memperoleh Buku Nikah dan mendapatkan hak-hak keperdataan lainnya.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa pernikahan pemohon I dan pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 14 serta tidak melanggar Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Hal. 6 dari 8 hal. Pen. No.100/Pdt.P/2016/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan pemohon I dan pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat pernikahan pemohon I dan pemohon II, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam pemohon I dan pemohon II berhak mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan pemohon I dan pemohon II dinyatakan telah beralasan dan berdasar hukum, sehingga permohonan pemohon I dan pemohon II agar pernikahannya disahkan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon I dan pemohon II.

Mengingat ketentuan pasal-pasal tersebut serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (Sainella Dg. Maro bin Dg. Nguru) dengan pemohon II (Kartini Dg. Jinne binti Dg. Lalla) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 1979 di Lingkungan Bilacaddi, Kelurahan Maradekaya, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar.
3. Membebankan pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh hakim tunggal Pengadilan Agama Takalar pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1438 Hijriyah, oleh Dra. Hartini Ahada sebagai hakim tunggal dengan dibantu oleh Dra. Hj. Aisyah sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim

Hal. 7 dari 8 hal. Pen. No.100/Pdt.P/2016/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunggal dengan dihadiri oleh panitera pengganti tersebut dan pemohon I dan pemohon II.

Hakim Tunggal

Dra. Hartini Ahada

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Aisyah

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp 50.000,00
3. Redaksi	: Rp 5.000,00
4. Meterai	: Rp 6.000,00
<hr/>	
Jumlah	: Rp 91.000,00
(sembilan puluh satu ribu rupiah)	

Hal. 8 dari 8 hal. Pen. No.100/Pdt.P/2016/PA Tkl.